

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat yang dapat diartikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan serta evaluasi dan pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya di sektor swasta (Bastian, 2013). Sektor publik sering dinilai sebagai sarang pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

Value for Money merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2009). Ekonomis: pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* yang

terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *input*.

Value for money adalah suatu konsep yang menilai kinerja suatu organisasi sektor publik tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi aspek *non* keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Penerapan *value for money* (VFM) penting bagi perusahaan sebagai pelayan masyarakat, karena implementasi konsep akan memberi manfaat untuk menilai 1) efektivitas publik, 2) mutu pelayanan, 3) menurunkan biaya pelayanan publik, 4) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan 5) meningkatkan *public cost awarness* sebagai dasar pelaksanaan pertanggungjawaban publik. (Mardiasmo, 2009).

Pada proses kinerja anggaran di masa ini lebih mengutamakan penyerapan anggaran dibandingkan dengan melakukan penghematan dana anggaran sehingga banyak anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak terjadi efisiensi anggaran, dan banyak penggunaan anggaran yang menyimpang dengan tujuan atau target kebijakan. Permasalahan lain yaitu kinerja anggaran yang selama ini memiliki kelemahan perencanaan dalam pengalokasian anggaran belanja menyebabkan lemahnya kinerja, sehingga ada unit kerja yang kelebihan

pembiayaan dan ada pula unit kerja yang kekurangan pembiayaan. Juga sulit menentukan prioritas atau bahkan tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan sehingga menimbulkan pemborosan sumber daya publik.

Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan Indonesia yaitu masih kurangnya profesionalisme dalam melayani masyarakat. Kenyataan ini menyadarkan perlu adanya perhatian khusus untuk petugas pelayanan. PDAM Tirta Bangka merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyediaan air bersih di Sungailiat. PDAM berfungsi untuk melayani kebutuhan hidup orang banyak dengan menyediakan layanan air bersih dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya yang digunakan kembali untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat.

Dalam situasi ini harusnya organisasi pemerintah seperti perusahaan daerah air minum (PDAM) bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tidak berdasarkan pada *value for money*. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan atau alat untuk mengantarkan organisasi pemerintah dalam hal ini PDAM mencapai *good governance* yaitu organisasi pemerintah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik pada PDAM Tirta Bangka (Meri dan Khairani, 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai "**Analisis *Value For Money* Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pdam Tirta Bangka**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana analisis *value for money* dalam meningkatkan pelayanan publik pada PDAM Tirta Bangka?"

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar pembahasan dapat lebih terfokus dan mempermudah pengolahan data, maka perlu diterapkan batasan-batasan penelitian yang akan dilakukan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya mengkaji analisis *value for money* dalam meningkatkan pelayanan publik pada PDAM Tirta Bangka.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan "Bagaimana analisis *value for money* dalam meningkatkan pelayanan publik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bangka?"

1.5. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Akademisi dan dapat menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik

yang berkaitan dengan analisis *value for money* suatu perusahaan pada tingkat pelayanan publik serta mengetahui secara langsung kesesuaian antara teori yang diterima selama perkuliahan dengan praktik secara langsung di lapangan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan praktek terhadap BUMD tentang pelayanan publik dengan *value for money* serta dapat dijadikan masukan bagi perusahaan untuk melakukan peningkatan atau perbaikan kinerja berdasarkan pengukuran tersebut.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam menentukan kebijakan tingkat pelayanan publik khususnya pada PDAM Tirta Bangka.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan. Sistematika penulisan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian ini, penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang berisikan teori-teori yang digunakan sebagai bahan penelitian. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi tinjauan pustaka, rerangka pemikiran yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berpikir secara logis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.